

LAKIP DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji Sykur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2015. Selain itu LAKIP/SAKIP sebagai media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati dalam hal pencapaian kinerja instansi yang secara berkala disusun laporannya setiap tahun, serta sebagai alat umpan balik untuk sarana perbaikan dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian LAKIP/SAKIP ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya akan tetapi kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan penyusunan LAKIP/SAKIP dimasa yang akan datang.

Masamba, Februari 2017

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD NUR, SE

Pkt : Pembina Tk.

NIP : 196212311996101001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja dan terencana dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atau kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan, dalam proses perubahan itu adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan Sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak – pihak yang berkepentingan (stake holder).

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek – praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kebijakan pembangunan Daerah yang dianggap penting strategis setelah memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, karakteristik dan potensi wilayah serta kebijakan pemerintah pusat dalam bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi dalam memacu percepatan pembangunan daerah.

Kebijakan program ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS yang terjadi di masyarakat, Peningkatan SDM serta pemberian bantuan untuk korban bencana alam, sosial dan PMKS lainnya dan pelatihan serta penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran serta peningkatan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, agar para pengusaha dan pekerja dapat memahami hak dan kewajiban masing – masing guna menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis. Sedangkan kebijakan program ketransmigrasian berorientasi pada pemberdayaan kawasan transmigrasi melalui pembangunan permukiman yang memenuhi standar catur layak, pengembangan sentra – sentra produksi baru dan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya kelembagaan dan sosial budaya secara terus menerus dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah guna menjawab upaya – upaya pengentasan kemiskinan.

LAKIP/SAKIP Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan – hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat Capaian Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja	3	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	2	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	2	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai – nilai Kepahlawanan	1	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin	1	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Kemandirian Kesejahteraan Sosial	4	Sangat Berhasil

7	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Kinerja Aparatur	3	Sangat Berhasil
Total Jumlah Indikator		43	

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 8 sasaran, disimpulkan bahwa
 - 8 sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil
2. Dari 8 Sasaran telah ditetapkan indikator kinerja 19
3. indikator sasaran dengan hasil capaian sebagai berikut :
 - 19 Indikator kinerja sasaran dengan capaian 80 s/d 100 (predikat Sangat Berhasil)

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin	33
Sasaran 6	Meningkatnya Kemandirian Kesejahteraan Sosial	34
Sasaran 7	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	34
Sasaran 8	Meningkatnya Kinerja Aparatur	35
B. REALISASI ANGGARAN		36
BAB IV	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Pembentukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah salah satu unit kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasian.

1. Kedudukan

Merupakan unsur pelaksana otonomi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi..

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang-undangan dengan menempatkan aparatur di daerah untuk lebih mampu menata, mengelolah sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan uraian tugas Pemerintahan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara menuju good governance dan clean government maka jajaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk Kegiatan Tahun 2016.

Adanya kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelolah pembangunan wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumber daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah maka pemerataan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat, kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja demi terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha peningkatan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan serta persebaran pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan serta persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan uraian tersebut diatas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program tahunannya (kegiatan tahun 2016 yang ditunjang dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan APBN.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah salah satu unit kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Adanya kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelolah pembangunan wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumber daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah maka pemerataan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat, Kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja demi terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha, penigkatan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan serta persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. -

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta banyaknya masalah – masalah sosial yang ada di masyarakat sekarang ini, pertimbangan atas masalah-masalah dalam hal kualitas penduduk

yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan pertambahan angkatan kerja, penerapan syarat – syarat kerja di perusahaan masih sangat rendah, Tingkat kepedulian pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerjanya masih rendah, dan sebahagian besar perusahaana belum memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja secara tertulis, maka kebijakan utama pembangunan Sosial Masyarakat yang dicanangkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program tahunannya (kegiatan tahun 2016 yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD dan APBN yang memuat indikator kinerja/ keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi pelaksana..

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Bupati Luwu Utara atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Luwu Utara mengacu kepada :

1. Tap MPR RI nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem AKIP;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/B/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Analisa Strategik yang berpengaruh pada perkembangan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Luwu Utara sesuai dengan kondisi saat ini yang mengkaji kondisi yang diharapkan.

1. Kondisi saat ini

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat antara lain :

❖ Peralatan Kantor

1	AC	17 Unit	18	Printer Epson	12 Unit
2	Kipas Angin Gantung	5 Unit	19	Komputer	11 Unit
3	Kipas Angin Berdiri	5 Unit	20	Laptop	22 Unit
4	Kulkas	1 Unit	21	Notebook	36 Unit
5	Mesin Pembabat Rumput	1 Unit	22	Proyektor + Layar	2 Unit
6	Kamera Digital	3 Unit	23	Penyimpan Strom	1 Unit
7	Warles	2 Unit	24	Teodolite	1 Set
8	Televisi	2 Unit	25	GPS	1 Set
9	Printer A3	3 Unit	26	Meja Kerja	78 Unit
10	Printer A4	2 Unit	27	Kursi Rapat	117 Unit
11	Kursi Tamu	3 Set	28	Lemari Arsip	54 Unit
12	Meja Rapat	2 Set	29	Kain Gorden	51 Meter
13	Lemari Pernika	3 Unit	30	Lemari Besi	1 Unit
14	Mesin Ketik	9 Unit	31	Mesin Ketik Listrik	2 Unit

15	Meja Telepon	3 Unit	32	Dispenser	1 Unit
16	Papan Potensi	10 Unit	33	Kursi Kerja	26 Unit
34	Timbangan	1 Unit	36	Meja Gambar	1 Set
35	Brangkas	2 Unit	37	Komputer +CPU+Printer	5 Set

Sumber Data (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu Utara 2015)

❖ **Mobilitas Kantor**

1.	Mobil : 2 Buah	2.	Sepeda Motor : 16 Unit
----	----------------	----	------------------------

2. Sumber Daya Manusia/Kondisi pegawai terdiri dari :

a). Kendala Internal

- Terbatasnya aparatur PNS, adanya beberapa bidang yang tidak memiliki staf sehingga belum bisa berperan secara optimal sesuai dengan cakupan beban kerja yang dilaksanakan cukup luas.
- Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM aparatur.
- Terbatasnya pembiayaan untuk membiayai Program Kualitas SDM Aparatur

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Gambaran Umum Unit Kerja
 - B. Latar Belakang
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Dasar Hukum
 - E. Sistematika Penulisan

- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. Struktur Organisasi
 - B. Tugas Pokok dan Fungsi
 - C. Visi dan Misi
 - D. Tujuan
 - E. Sasaran
 - F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran

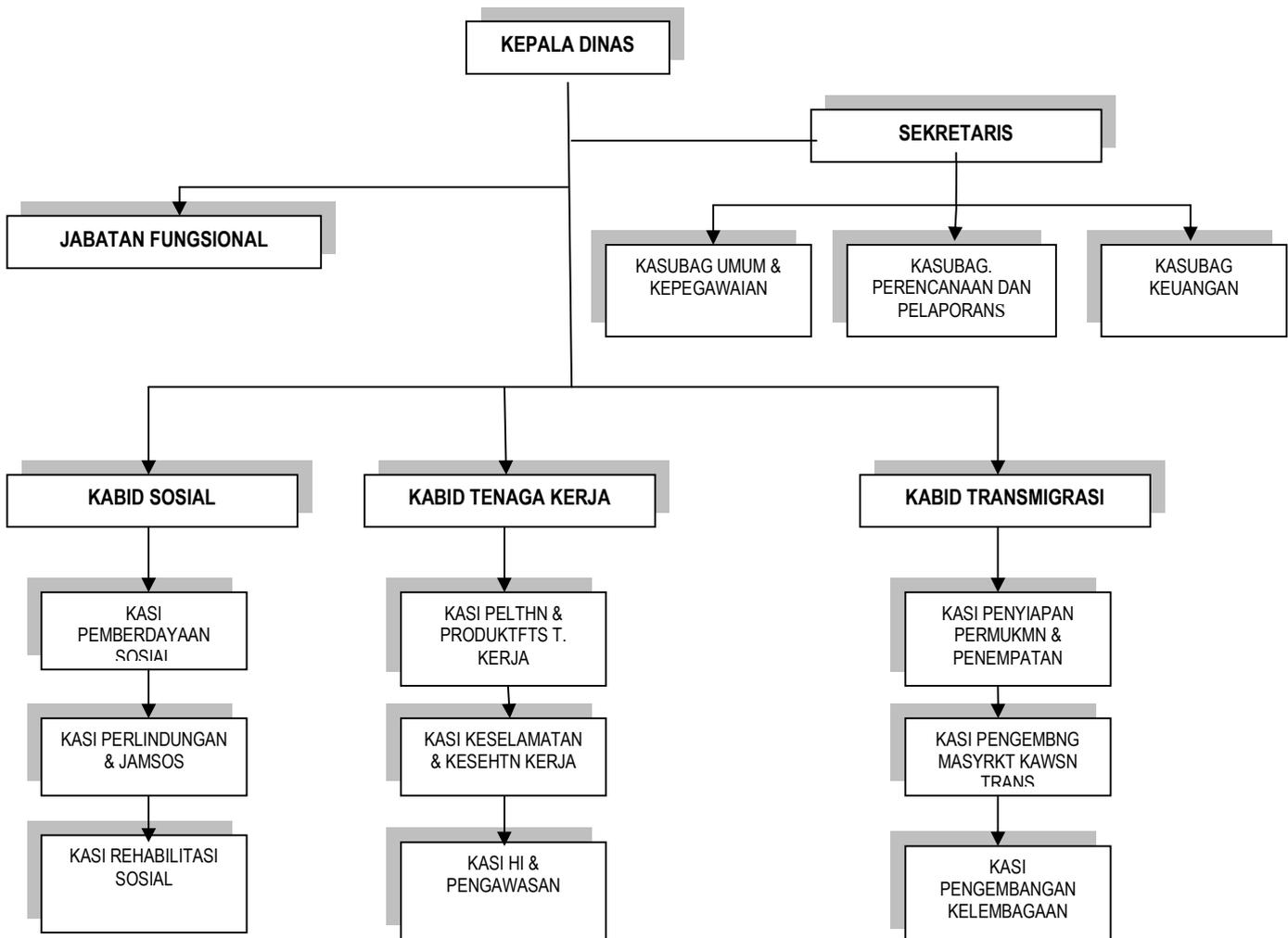
- BAB IV PENUTUP
 - A. Kesimpulan Kinerja

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. STRUKTUR ORGANISASI

Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka setelah dilakukan restrukturisasi perangkat daerah kabupaten diperoleh struktur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :



Dengan uraian tugas sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SEKRETARIS

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan teknis ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan perencanaan dan pelaporan serta urusan keuangan serta melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berjumlah 3 orang terdiri dari:

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan operasionalisasi, memberitugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas Di Bidang Perencanaan dan Pelaporan.

➤ Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan laporan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BIDANG SOSIAL

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang sosial. Bidang Sosial terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

➤ **Seksi Pemberdayaan Sosial**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial

➤ **Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Mempunyai tugas membantu kepala Bidang Sosial dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

➤ **Seksi Rehabilitasi Sosial**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial

BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam operasional, memberi tugas, memberi petunjuk , mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terbagi menjadi 3 Seksi yaitu :

➤ **Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

➤ Seksi Hubungan Industrial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan

➤ Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BIDANG TRANSMIGRASI

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, memberi tugas , memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi. Bidang Transmigrasi terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

➤ Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan

Mempunyai tugas membantu Bidang Transmigrasi dalam merencanakan kegiatan , memberi petunjuk , memberi tugas , membimbing , memeriksa/ mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan.

➤ Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk , memberi tugas, memberi , memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

➤ Seksi Pengembangan Kelembagaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pengembangan Kelembagaan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. VISI DAN MISI

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) yang dituangkan dalam Visi, Misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya.

Berkaitan dengan pengertian visi tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk merumuskan lahirnya sebuah visi yaitu antara lain, berorientasi kedepan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, serta berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, maka dengan berdasar dari uraian tersebut diatas maka kami merumuskan Visi yang berbunyi :

“ Terwujudnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Profesional dan Pemukiman yang Berkualitas ”.

Dengan visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara, maka dapat diberikan penjabaran tentang pengertian dari visi tersebut, yaitu :

Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Kesejahteraan Sosial adalah hal atau keadaan aman, keselamatan dan ketentraman.

Tenaga Kerja Profesional adalah bagaimana menciptakan pekerja yang dapat berhasil guna dan berdaya saing serta mampu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, Tenaga Kerja profesional diciptakan agar dapat bersaing dengan pasar, baik secara nasional maupun internasional, sehingga bukan hanya mengharapkan atau menunggu pekerjaan dari orang lain tapi juga mampu mengembangkan kreatifitas sendiri.

Pemukiman yang berkualitas adalah bagaimana memberikan atau memfasilitasi tempat yang aman dan nyaman kepada masyarakat untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya.

2. Misi

Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah Tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian.

Adapun Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia dan melalui pemberdayaan, penempatan tenaga kerja dan keterampilan Kerja.
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. meningkatkan industrial meningkatkan hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Membangun semangat kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial.
5. Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin yang layak huni.
6. Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
7. Pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi didaerah terisolir sebagai sentra produksi.
8. Mengembangkan sistem pelayanan organisasi kemasyarakatan melalui pemberdayaan kelembagaan.

D. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015.

a). Tujuan dan Sasaran mewujudkan Misi Ke-Satu

Selanjutnya Dalam mewujudkan **Misi Kesatu: Meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia melalui pemberdayaan, penempatan Tenaga Kerja dan Keterampilan Kerja.**

Tujuan: 1. Meningkatkan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Sasarannya: Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja

b). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Dua

Dalam mewujudkan **Misi Ke-Dua: Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial,**

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Sasarannya : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

c). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Tiga

Dalam mewujudkan **Misi Ke-Tiga: Meningkatkan hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,**

Tujuan : Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan

Sasarannya : 1. Meningkatnya pembinaan Hubungan Industrial

2. Meningkatnya pengawasan Ketenaga Kerjaan

d). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke- Empat

Dalam mewujudkan **Misi Ke-Empat: Meningkatkan semangat nilai – nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial**

Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai – nilai kepahlawanan

Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai – nilai kepahlawanan.

e). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Lima

Dalam mewujudkan Misi Ke-Lima: Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin yang layak huni

Tujuan : Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

Sasaran : Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat miskin

f). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Enam

Dalam mewujudkan Misi Ke-Enam : Mewujudkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan : Meningkatkan kemandirian kesejahteraan sosial

Sasaran : Meningkatnya kemandirian kesejahteraan sosial

g). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Tujuh

Dalam mewujudkan Misi Ke-Tujuh : Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah terisolir sebagai sentra produksi

Tujuan :1. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2. Meningkatkan Pembinaan Sosial Ekonomi secara berkesinambungan di kawasan transmigrasi

Sasaran :1. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

2. Meningkatnya Pembinaan Sosial Ekonomi secara berkesinambungan di kawasan transmigrasi.

h). Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke-Delapan

Dalam mewujudkan Misi Ke-Delapan : Mengembangkan sistem pelayanan Organisasi Kemasyarakatan melalui pemberdayaan kelembagaan

- Tujuan :**
1. Meningkatkan Kinerja aparatur
 2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kinerja aparatur
 2. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja, yaitu tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan SKPD yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah dalam hal ini Bupati Luwu Utara, Penetapan kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta jumlah anggaran yang sudah disetujui.

Perjanjian kinerja tahun 2017 mengacu pada rencana strategis 2016 – 2021, dimana sasaran kinerja disajikan bersama indikator kinerja dan target. Sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Adapun perjanjian kinerja tahun 2017 sebagai berikut :

Selanjutnya Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2017 dirinci kedalam sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran dan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
1	Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	Orang	6.511
		2. Jumlah Penempatan Pencari Kerja	Orang	1.000
		3. Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan	Kelompok	19 Paket /8 klp, 1 Unit
2	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Miskin	4. Jumlah Bantuan Bahan Bangunan	Jiwa /KK	100
3.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	5. Jumlah Bantuan Jadup Lansia	Orang	300 /3 Kec
		6. Jumlah Bahan Bantuan Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa, Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) unuk korban bencana alam , Sosial dan PMKS Lainnya	Jiwa/KK	40 / 15
		7. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Konflik Sosia	Orang	150
		8. Jumlah Pendamping dan Operator Yang Menerima Jasa	Orang	37/ 4
		9. Jumlah Napi yang Mendapatkan Bimbingan Sosial dan Mendapatkan Bantuan	Orang	245
4.	Anak Terlantar Mandiri	10. Jumlah Anak Terlantar Yang Dilatih	Orang	10
		11. Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapat Bantuan KUBE	KUBE	4
5	Penyandang Cacat Yang Mandiri	12. Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma Yang Mendapat Bantuan	UEP	6
6.	Meningkatnya Pembinaan Panti Asuhan	13. Jumlah LKSA Yang Dibina dan diberdayakan	Panti	9

7	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai – nilai Kepahlawanan	14. Jumlah Simbol – simbol sejarah yang dipelihara	Tempat	7
8.	Lembaga Yang Efektif dan Efisien	15. Jumlah Guru TPA, TPH,TPK dan Petugas Masjid Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Orang	315 Org Guru TPA,TPH,TPK 3 Org Petugas Masjid
		16. Jumlah Larang Taruna Yang Dibina dan Jumlah Pemberdayaan Karang Taruna	KT	1/ 1 KT
9.	Kebutuhan Areal Transmigrasi Dapat Terpenuhi	17. Jumlah KK Transmigrasi Yang Akan Dibina	KK	1.026
		18. Jumlah DED	1	Dokumen
10	Meningkatnya Kinerja Aparatur	19. Jumlah Aparat Yang Mengikuti Bimtek	Orang	15
		20. Persentase Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu sesuai SAP	%	100
		21. Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu Sesuai SAP	%	100

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Utara untuk satu Tahun mendatang.

Penetapan kinerja yang merupakan amanat dari Inpres Nomor 05 Tahun 2004.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Luwu Utara dan telah Menetapkan 18 (Delapan belas) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian , Ketatausahaan dan Asset

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

- Kunjungan Kerja Bersama Bupati / Wakil Bupati/ DPRD/Muspida /Pejabat Pemerintah Tingkat Atas / Unit Kerja Terkait dan Pihak Lainnya.

f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin , KOMunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial ekonomi di Kawasan Transmigrasi
- Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

h. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

i. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia
- Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Konflik Sosial.
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS).

j. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

k. Program Pembinaan Anak Terlantar

- Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
- Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar

l. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

n. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan / LKSA

o. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

p. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

q. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Struktur Bagi PNS Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.

Pada tahun 2016 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 sasaran dengan menggunakan 11 indikator yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2017. Dari 11 Indikator sebanyak 10 indikator (95%) mencapai / melebihi target, sebanyak 1 insikator (5 %) tidak mencapai target.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

NO	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	85 s/d < 100
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja	3	99,93	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	2	99,78	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	2	99,96	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan	1	97,51	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin.	1	100	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Kemandirian Kesejahteraan Sosial.	4	97,51	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	99,75	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Kinerja Aparatur	3	99,88	Sangat Berhasil

Secara rinci capaian masing – masing indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	1. Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	Orang	7000	8000	9000	9015	10000	6511	3682	7236	6134	6511	6268	4706	72,28 %
	2. Jumlah Penempatan Pencari Kerja	Orang	300	300	400	400	500	1000	258	237	244	400	338	1034	100%
	3. Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan	Kelompok	31	32	32	31	31	31	5	6	9	10/17 Klp	13/22 Klp	19/8 Klp/1 Unit	87,10%

1. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke : Meningkatkan Harkat dan Martabat Hidup Manusia Melalui Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Ketrampilan Kerja..

Bahwa Pencapaian Sasaran Yang berkaitan dengan Misi ke 1 Meningkatkan Harkat dan Martabat Hidup Manusia melalui Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Ketrampilan Kerja ; Bahwa Pencari Kerja yang terdaftar targetnya 6511 Orang realisasi 4706 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 72, 28 %. Jumlah Penempatan Pencari Kerja. Target 1000 Orang realisasi 1034 Orang sehingga capaian kinerjanya melebihi dari target . serta Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan target 31 Kelopompok realisasi 19/8 Kelompok maka capaian kinerjanya 87,10%. Terkait dengan kinerja tidak tercapai hal ini disebabkan beberapa factor antara lain :

1. Alokasi Anggaran Kurang
2. Serapan Lowongan Kerja Minim
3. SDM yang tidak memenuhi.

Sasaran 2

'Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Persentase Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Alam, Bencana Sosial	Persen	70	75	80	80	80	80	75	75	80	80	85	80	100%
	Jumlah Pembinaan Guru Guru	Orang	250	270	270	275	275	315	250	283	296	307	307	315	100%
	Jumlah Pembinaan Petugas Masjid	Orang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
	Jumlah Penanganan Keluarga Yang Bermasalah	Persen	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 2 : Mengembangkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Bahwa Pencapaian Sasaran Yang berkaitan dengan Misi ke 2 tersebut dengan indicator sasaran dengan Mengembangkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial ; Bahwa dalam Misi Kedua ini Realisasi sudah tercapai 100% dari target sesuai dengan table yang ada. Hal ini disebabkan dengan factor Alokasi Anggaran Tercapai

Sasaran 3

' Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Bantuan Penyelesaian Hubungan Industrial	Kasus	5	7	9	10	11	11	5	40	40	60	40	40	100%
	Jumlah Sosialisasi Tenaga Kerja	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	100%
	Persentase Bantuan Hukum dan Jamsostek	%	45	50	65	85	80	100	50	50-	50	40	50	100	100%
	Persentase Bantuan Hukum Bagi K3	%	65	70	70	85	85	100	75	90	50	-	100	100	100%

'3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 3 : Meningkatkan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan..

Bahwa Pencapaian Sasaran Yang berkaitan dengan Misi ke 3 tersebut dengan indicator sasaran dengan Meningkatkan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.; Bahwa dalam Misi Ketiga ini Realisasi sudah tercapai 100% dari target sesuai dengan table yang ada. Hal ini disebabkan dengan factor Alokasi Anggaran Tercapai

Sasaran 4

' Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Simbol – simbol sejarah yang dipelihara	TMP	1	4	4	4	4	7	4	4	4	7	7	7	100%

4. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 4 : Meningkatkan Semangat Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Sosial.

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke – 4 Meningkatkan Semangat Nilai-nilai Kepahlawanan dengan sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, dengan jumlah indikator sasara target 7 realisasi 7 sehingga capaian kinerjanya 100%. Hal ini karena adanya dukungan Anggaran darp pemerintah Daeeah untuk peningkatan nilai-nilai kepahlawanan yang sangat besar.

Sasaran 5**' Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Produktif (KUBE UEP)	RT	-	75	75	100	100	2	2	6	2	--	2	1	50%
	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan BBR	KK	75	75	75	75	75	27	75	52	30	38	25	27	100%

5. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 5 : Mewujudkan Pemukiman Masyarakat Miskin Yang Layak Huni

Sasaran 6**' Meningkatkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	KT	1	2	2	2	2	1	1	1	1	109	1	1	100%
	Jumlah Karang Taruna Yang Dibantu	KT	3	5	5	5	5	1	5	6	3	5	4	1	100%
	Jumlah Pembinaan Panti Asuhan	Panti Asuhan		2	3	3	3	9	-	5	-	9	9	9	100%
	Persentase Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	%	75	80	85	90	95	95	75	75	95	95	95	100	100%
	Jumlah Anak Terlantar Yang Dilatih	Anak	20	25	30	35	40	45	10	10	9	20	4	10	25,50 %

Sasaran 7

' Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Dokumen	Lokasi	-	-	2	5	7	1			-	2	2	1	100%
	Jumlah KK Yang Dibina	KK	926	926	926	926	926	1026	926	350	926	926	1026	1026	100%

'7. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 7 : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Daerah Terisolir Sebagai Sentra Produksi

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke 7 tersebut dengan Sasaran Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Meningkatkan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi secara berkesinambungan di Kawasan Transmigrasi dengan indikator jumlah dokumen dan jumlah KK yang dibina 1026 KK realisasi 1026 KK 100%.

Sasaran 8

' Meningkatkan Kinerja Aparatur

NO	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET						REALISASI						Capaian Kinerja
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	Orang	11	15	15	15	15	15	5	10	56	52	5	15	100%
	Persentase Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu Sesuai SAP	%	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

8. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA (SASARAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA)

Misi RPJMD Ke 8 : Mengembangkan Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pemberdayaan Kelembagaan

Pencapaian Pada Misi ke – 8 ini dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Aparatur dan sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur. Dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik serta laporan yang akuntabel. Indikator sasaran jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek target 15 realisasi 15 dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian target tercapai karena dukungan Dana. Untuk Laporan Keuangan Sementara dan Akhir Tahun capaian kinerja mencapai 100% ini didukung dengan sumber dana yang meningkat untuk mencapai target.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 seperti tabel berikut :

Tabel .3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	R p. 3.321.557.000,-	Rp. 3.293.469.140,-	99,15
2.	Belanja Langsung	Rp. 7.401.523.125,-	Rp. 7.298.578.726,-	98,61
	Jumlah	Rp. 10.723.080.125,-	Rp.10.592.047.866,-	98,78

BAB IV.

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindiskan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran, disimpulkan bahwa 9 (sembilan) sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil

Dari 8 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 19 indikator kinerja dengan capaian angka 85 s/d 100 (predikat Sangat Berhasil).

Sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara dalam Tahun Anggaran 2016, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk organisasi. Di bidang Ketenagakerjaan yaitu : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk bidang Ketransmigrasian yakni : Program Pengembangan wilayah Transmigrasi. Bidang Sosial yakni program, Program pelayanan dan Rehabilitasi kesos, Program Pembinaan anak terlantar , program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma, program pengelolaan areal pemakaman, program pemberdayaan kesejahteraan sosial.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut telah diupayakan secara optimal dengan hasil capaian kinerja yang mengesankan yaitu 75% sampai 98% baik capaian kinerja kegiatan maupun capaian kinerja sasaran dengan menggunakan barometer/indikator yang telah ditetapkan. Hasil-hasil tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan, meminimalkan ancaman dan hambatan lingkungan strategi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang didukung input pembiayaan baik dari APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2016.

Sejalan dengan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan diakuinya terdapat hasil yang tidak optimal antara lain kelemahan penanganan personil dalam mengelola kegiatan baik kuantitas maupun kualitas, adanya persepsi yang belum dimengerti dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, adanya data tenaga kerja dan pengangguran yang belum akurat karena koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal, terbatasnya pegawai teknis khususnya di bidang HI dan pengawasan ketenagakerjaan, kemauan dari para pengusaha untuk menerapkan aturan ketenagakerjaan masih sangat minim adanya lokasi calon areal transmigrasi yang layak untuk pengembangan permukiman.

Berbagai kendala dan permasalahan dimaksud telah diupayakan untuk diatasi dengan memanfaatkan sumber-sumber organisasi yang ada. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kendala tersebut pada masa yang akan datang diperlukan antara lain : peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur, intensitas sosialisasi dan program, peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait ditingkatkan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan menerima manfaat kegiatan serta peningkatan sumber daya tenaga kerja dan transmigran secara terencana dan terukur.

Masamba, Februari 2017

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD NUR, SE

Pkt : Pembina Tk.I

NIP : 196212311996101001

